



LAPORAN LKJIP

Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
(LKJIP) Tahun 2025

Dinas Sosial
Provinsi Kalimantan Timur

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 ini dapat kami selesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) ini dibuat sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa dalam penyajian laporan ini masih banyak terdapat kekurangan oleh karena itu kritik dan saran sangat kami perlukan untuk penyempurnaan laporan yang akan datang. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Kepala,



Dra. Andi Muhammad Ishak, Apt., M.Si.
Penyelia Utama Madya / IV d
NIP. 19680814 199403 1 012

RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu permasalahan terjadinya disfungsi sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat adalah terjadinya disfungsi sosial, baik akibat kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunasusilaan, keterbelakangan, keterasingan, korban tindak kekerasan maupun akibat korban bencana. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur sebagai SKPD yang menangani permasalahan tersebut diatas sangat berkomitmen untuk memulihkan dan mengembangkan keberfungsian sosial masyarakat yang hasil-hasil pelaksanaan kegiatannya dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2025 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur ini disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Palaporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah. Petunjuk teknis ini memberikan tuntunan kepada instansi pemerintah untuk menyiapkan Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah sebagai bagian integral dari sistem akuntabilitas yang utuh.

Adapun kondisi Pembangunan Kesejahteraan Sosial saat ini populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebesar 231.437 jiwa. Pencapaian PPKS yang tertangani dengan Program dan Kegiatan adalah sebanyak 13.51 %.

Kondisi ini terlihat pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur pada posisi BB.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vi
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
B. Tugas dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi	2
D. Sumber Daya Aparatur	11
E. Aspek Strategis Organisasi	11
F. Isu-isu Strategis	12
G. Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah ...	13
 BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS	14
1. Tujuan	14
2. Sasaran	15
3. Indikator Kinerja Sasaran	15
4. Target Tahunan	16
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	34
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	35
 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Laporan Hasil Evaluasi dan Implementasi	36
B. Pengukuran Capaian Kinerja	39
C. Analisis Capaian Kinerja	40
D. Realisasi Anggaran	47
 BAB. IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Daftar Tabel	IV
Daftar Gambar	V

DAFTAR TABEL

No	Tabel	Halaman
1.	Tabel 1.1 Sumber Daya Aparatur (SDA)	11
2.	Tabel 1.2 Sarana & Prasarana Dinas Sosial Prov. Kaltim	13
3.	Tabel 2.1 Target Tahunan	17
4.	Tabel 2.2 Program dan Kegiatan	18
5.	Tabel 2.3 Penetapan Indikator Kinerja Utama	34
6.	Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Prov Kaltim	35
7.	Tabel 3.1 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	36
8.	Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Dinas Sosial Prov. Kaltim Tahun 2025 Per Triwulan	39
9.	Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025	40
10.	Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur	41
11.	Tabel 3.5 Capaian Realisasi Kinerja Dinas Sosial Prov Kaltim Tahun 2025	41
12.	Tabel 3.6 Capaian Realisasi Indikator Makro Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur (RPJMD Perubahan) 2024 -2026	42
13.	Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dengan LKJIP Provinsi Kaltim.....	42
14.	Tabel 3.8 Analisis Efisiensi Sumber Daya Dinas Sosial	47
15.	Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja	48
16.	Tabel 3.10 Realisasi Anggaran APBD	48

DAFTAR GAMBAR

Grafik		Halaman
1.	Grafik 1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Prov. Kaltim	2
2.	Grafik 3.1. Perkembangan dan Jumlah Anggaran APBD Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur periode 2019 –2025	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di Bidang Kesejahteraan Sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Sosial.

B. Tugas dan Fungsi

1. Tugas.

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas Pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Sosial.

2. Fungsi.

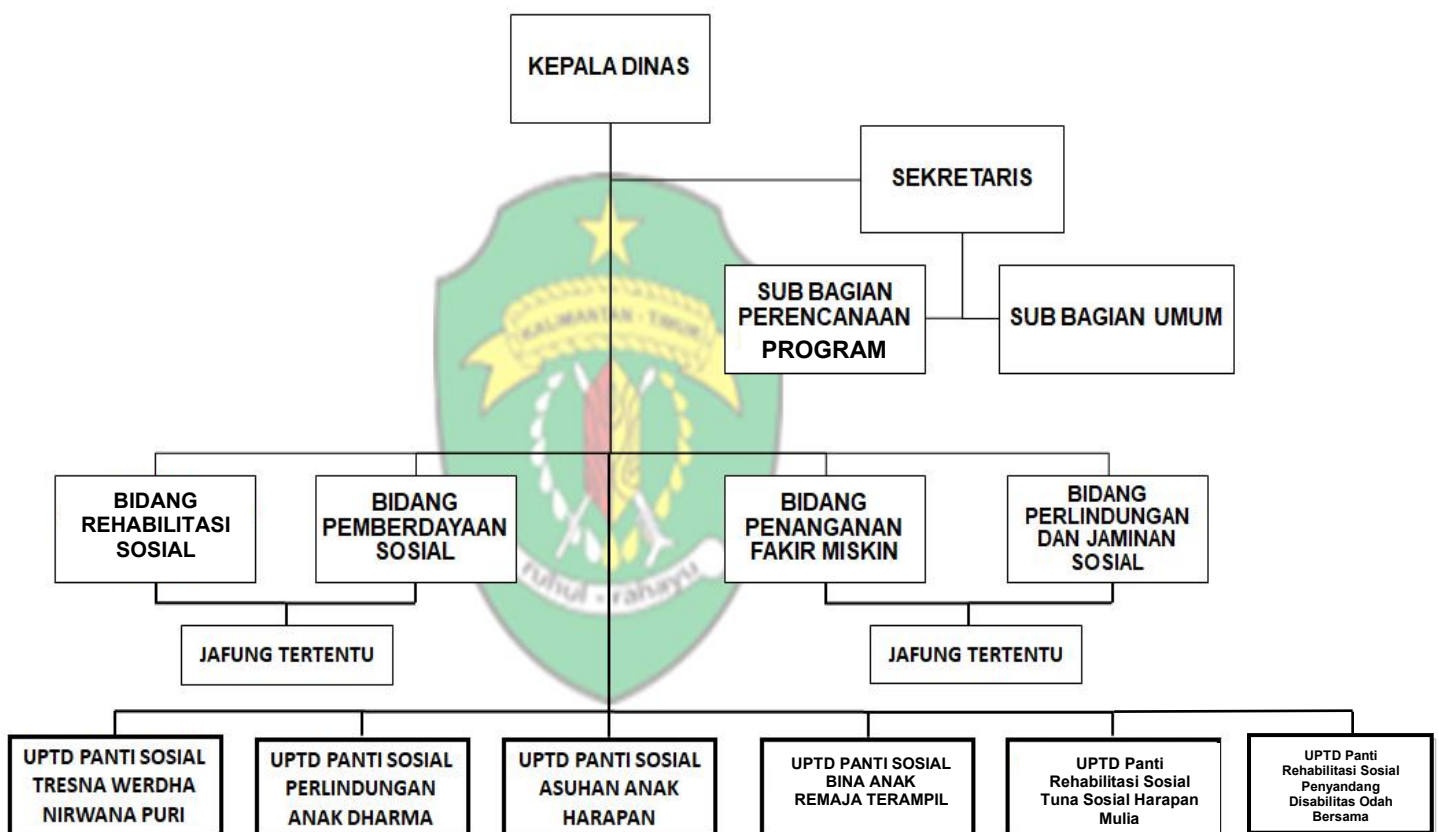
Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Dinas Sosial Prov Kaltim mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Sosial Sesuai dengan Rencana Strategi yang Ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis di Bidang Sosial;
- c. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Bidang Sosial;
- d. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Pemberdayaan Sosial;

- e. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- f. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Bantuan dan Jaminan Sosial;
- g. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Dengan Bidang Tugasnya.

C. Struktur Organisasi

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan memiliki 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 6 (Enam) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta Pejabat Fungsional Tertentu Seperti yang digambarkan pada bagan Struktur Organisasi di bawah ini :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Prov. Kaltim

Kepala Dinas, membawahi :

1. Sekretariat.;
2. Bidang Pemberdayaan Sosial;
3. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
4. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
5. Bidang Penanganan Fakir Miskin;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. SEKRETARIAT

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, dan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi serta pelaporan. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Perencanaan Program, Administrasi Umum dan Keuangan;
- b. Penyiapan Bahan Koordinasi Perencanaan Program, Administrasi Umum dan Keuangan;
- c. Penyiapan Bahan Koordinasi Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Penyiapan Bahan Koordinasi Administrasi Umum dan Kepegawaian, Ketatalaksanaan, Perlengkapan dan Pemeliharaan, Hukum dan Kehumasan Serta Pengaduan Masyarakat;
- e. Penyiapan Bahan Koordinasi Penyusunan Anggaran, Perbendaharaan, Verifikasi dan Akutansi Keuangan;
- f. Pelaksanaan Tugas Lainnya yang Diberikan Atasan Sesuai Dengan Bidang Tugas dan Fungsinya.

Sekretariat membawahi Sub Bagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- Sub Bagian Perencanaan Program, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan;
- Sub Bagian Umum, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;

2. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Bidang Pemberdayaan Sosial Mempunyai tugas pokok penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian serta pengembangan teknis pemberdayaan komunitas adat terpencil, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat serta pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, pemberdayaan peran keluarga dan penyuluhan sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat Serta Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial, Pemberdayaan Peran Keluarga dan Penyuluhan Sosial;
- b. Penyiapan Bahan Koordinasi Perencanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat Serta Pemberdayaan Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial, Peran Keluarga dan Penyuluhan Sosial;
- c. Penyiapan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat;
- d. Penyiapan Bahan-Bahan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;

- e. Penyiapan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Peran Keluarga dan Penyuluhan Sosial;
- f. Pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah UGB;
- g. Pelaksanaan Tugas Lainnya Yang Diberikan Atasan Sesuai Dengan Bidang Tugas dan Fungsinya.

3. BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis kesejahteraan anak, rehabilitasi tuna sosial dan korban napza, serta rehabilitasi penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Anak, Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Napza, Serta Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia;
- b. Penyiapan Bahan Koordinasi Perencanaan Program Peningkatan Kesejahteraan Anak, Rehabilitasi Tuna Sosial Dan Korban Napza, Serta Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia;
- c. Penyiapan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Kesejahteraan Anak;
- d. Penyiapan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Napza;
- e. Penyiapan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia;
- f. Pelaksanaan Tugas Lain yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai dengan Bidang Tugas dan Fungsinya.

4. BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bim-bingan, pengendalian serta pengembangan teknis penanggulangan bencana alam dan sosial, pencegahan dan pembinaan korban tindak kekerasan dan pekerja migran, pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial serta jaminan kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial, Pencegahan dan Pembinaan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial Serta Jaminan Kesejahteraan Sosial;
- b. Penyiapan Bahan Koordinasi Perencanaan Program Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial, Pencegahan dan Pembinaan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial Serta Jaminan Kesejahteraan Sosial;
- c. Penyiapan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Penyusunan Pedoman Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial;
- d. Penyiapan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Pencegahan Dan Pembinaan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;
- e. Penyiapan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Jaminan Kesejahteraan Sosial;
- f. Penyiapan Bahan Pembinaan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Pengelolaan Sumber Dana Sosial;
- g. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Dengan Bidang Tugas dan Fungsinya.

5. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penanganan fakir miskin di perkotaan, pedesaan dan daerah pesisir dan pulau terluar dalam pemenuhan kebutuhan dasar serta produktifitasnya secara sosial, kelembagaan dan ekonomi.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Penanganan Fakir Miskin;
- b. Penyiapan Bahan Koordinasi Perencanaan Program Penanganan Fakir Miskin;
- c. Memverifikasi dan Memvalidasi Data Calon Penerima Bantuan Program Penanganan Fakir Miskin di Perkotaan, Pedesaan Serta Daerah Pesisir dan Pulau Terluar untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebanyak 6 unit yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD tersebut terdiri dari

➤ UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI (PSTWNP)

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar.

Fungsi Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Nirwana Puri penyusunan rencana teknis operasional kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar, pelaksanaan kebijakan teknis operasional kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar.

Daya tampung 126 (seratus dua puluh enam) orang dengan susunan struktur organisasi sebagai berikut:

- Kepala UPTD, dengan dibantu :
- Bagian Tata Usaha;
- Seksi Penyantunan dan Pelayanan;
- Seksi Pembinaan SDM dan Penyaluran;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

➤ **UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA (PSPAD)**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang kesejahteraan sosial anak dalam pola perlindungan dan penyantunan dengan susunan.

Fungsi Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma (PSPAD) adalah penyusunan rencana teknis operasional kesejahteraan sosial anak, pelaksanaan kebijakan teknis operasional kesejahteraan sosial anak, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesejahteraan sosial anak.

Daya tampung 80 anak dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- Kepala UPTD, dengan dibantu:
- Bagian Tata Usaha;
- Seksi Penyantunan dan Pelayanan;
- Seksi Pembinaan dan Advokasi;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

➤ **UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN (PSAAH)**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Kesejahteraan Sosial.

Fungsi UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan (PSAAH) adalah penyusunan rencana teknis operasional kesejahteraan sosial anak terlantar, pelaksanaan kebijakan teknis operasional kesejahteraan sosial anak terlantar, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesejahteraan sosial anak terlantar.

Daya tampung 100 (Seratus) anak dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- Kepala UPTD, dengan dibantu :
 - Bagian Tata Usaha;
 - Seksi Penyantunan dan Pelayanan;
 - Seksi Pembinaan SDM dan Penyaluran;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

➤ **UPTD PANTI SOSIAL BINA ANAK REMAJA TERAMPIL (PSBART)**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang kesejahteraan sosial remaja terlantar.

Fungsi Panti Sosial Bina Anak Remaja Terampil (PSBART) penyusunan rencana teknis operasional kesejahteraan remaja terlantar, pelaksanaan kebijakan teknis operasional kesejahteraan remaja terlantar, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesejahteraan remaja terlantar.

Daya tampung sebanyak 105 (Seratus Lima) orang dengan susunan struktur organisasi sebagai berikut :

- Kepala UPTD, dengan dibantu :
 - Bagian Tata Usaha;
 - Seksi Penyantunan dan Pelayanan;
 - Seksi Pembinaan SDM dan Penyaluran;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

➤ **UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Harapan Mulia (PRSTS-HM)**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang kesejahteraan sosial dibidang pemberdayaan perempuan, pelayanan dan rehabilitasi sosial Tuna Sosial, korban tindak kekerasan dan korban trafficking.

Fungsi Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (PRSTS) Harapan Mulia penyusunan rencana teknis operasional pemberdayaan perempuan, pelayanan dan rehabilitasi tuna susila, korban tindak kekerasan dan korban trafficking. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan perempuan, pelayanan dan rehabilitasi tuna susila, korban tindak kekerasan dan korban trafficking.

Daya tampung 105 (Seratus Lima) orang dengan susunan. Struktur Organisasi sebagai berikut :

- Kepala UPTD, dengan dibantu
- Bagian Tata Usaha;
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sosial;
- Seksi Rehabilitasi dan Pembinaan Sosial;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

➤ **UPTD PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS ODAH BERSAMA (PRSPD)**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang kesejahteraan sosial dibidang Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti.

Fungsi Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama (PRSPD) sebagai pelaksana operasional teknis lapangan dalam memberikan layanan langsung, rehabilitasi, pembinaan, dan perlindungan sosial bagi penyandang Disabilitas.

Daya tampung 80 (Delapan Puluh) orang dengan susunan.
Struktur Organisasi sebagai berikut :

- Kepala UPTD, dengan dibantu
- Bagian Tata Usaha;

D. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur (SDA) merupakan salah satu unsur yang strategis dalam melaksanakan tugas-tugas Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD. Sampai dengan 31 Desember 2025 jumlah Sumber Daya Manusia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebanyak 150 orang dan PPPK sebanyak 194 Orang. Berdasarkan kualifikasi dapat dijelaskan sebagai tabel berikut :

Tabel 1.1. Sumber Daya Aparatur (SDA)

JABATAN	JENIS KELAMIN		GOLONGAN				PENDIDIKAN					
	PRIA	WANITA	IV	III	II	I	S2	S1	DIP L	SLTA	SLTP	SD
Kepala Dinas	1		1				1					
Sekretaris	1		1				1					
Kepala Bidang dan Kepala Panti	6	3	9				7	2				
Kepala Seksi	11	4		1	14		1	14				
Fungsional / Staff PNS	84	40	4	53	60	7	4	28	9	71	8	4
Jumlah PNS	103	47	15	54	76	7	14	44	9	71	8	4
PPPK	118	76					2	87	14	87	3	5
Jumlah ASN	221	123	15	54	76	7	16	127	23	158	11	9
JUMLAH KESELURUAHAN	344		150				344					

E. Aspek Strategis Organisasi

Pembangunan Kesejahteraan Sosial ditujukan untuk mewujudkan tata kehidupan dan penghidupan yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha dan memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, baik perorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta nilai sosial budaya setempat. Kesejahteraan Sosial merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam

rangka menanggulangi permasalahan-permasalahan sosial yang ada ditengah-tengah masyarakat. Sedangkan unsur pelaksana pemerintah di bidang kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi.

F. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur (Isu Strategis).

Isu-isu Strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis bagi Dinas Sosial diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Sosial di masa lima tahun mendatang.

Pelaksanaan pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial masih dibayangi oleh kecenderungan semakin meningkatnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Disadari bahwa kondisi ini merupakan tantangan yang sangat berat, jika tidak dilakukan penanganan secara cepat dan tepat maka akan berakibat pada terjadinya kesenjangan sosial yang semakin meluas yang berimplikasi pada lemahnya ketahanan sosial serta menimbulkan konflik sosial ditengah-tengah masyarakat. Isu Strategis terkait pembangunan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai

berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM;
2. Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan;
3. Transformasi Ekonomi Berbasis Industrialisasi yang Inklusif;
4. Pemerataan Pembangunan Wilayah;
5. Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Ekonomi;
6. Peluang Pembangunan Superhub Ekonomi dan Mitra IKN;
7. Kualitas Lingkungan Hidup dan Penurunan Emisi GRK;
8. Kemandirian Pangan;
9. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

G. Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah

Adapun sarana dan prasarana Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Prov. Kaltim

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	2	3	4
1	Tanah	3.426	M2
2	Gedung	3	Unit (2 Lantai)
		1.335	m2
3	Listrik	4	Jaringan
4	Air	1	Jaringan
5	Telepon	3	Line (1 Fax)
6	Area Parkir	2	Area
7	Ruang Rapat	3	Ruang
8	Ruang Arsip	2	Ruang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Hakikat Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah upaya peningkatan kualitas Kesejahteraan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelompok dan Komunitas Masyarakat yang memiliki harkat dan martabat, dimana setiap orang mampu mengambil peran dan menjalankan fungsinya dalam kehidupan. Hal ini dijadikan sebagai landasan untuk berfikir, berpijak dan bertindak dalam penyusunan Visi, Misi dan Strategi serta sebagai petunjuk pokok pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial daerah Kalimantan Timur.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan secara terencana, terpadu, selaras, bertahap, berkelanjutan dan merata serta dapat dirasakan oleh seluruh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial masyarakat pada umumnya dalam wujud perbaikan kualitas kehidupan yang berkeadilan Sosial.

Kesejahteraan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) artinya kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan Sosial warga negara terutama PPKS agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi Sosialnya.

Untuk mencapai Terwujudnya Kesejahteraan bagi PPKS maka diperlukannya peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial, peningkatan pemberdayaan PPKS, meningkatnya prakarsa dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan.

1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu ke depan (Kapan), Berdasarkan uraian tersebut, maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menetapkan tujuan sebagai berikut :

Meningkatkan Fungsi dan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara merata dan nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik instansi Pemerintah.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber data daerah dalam kegiatan organisasi/Pemerintah daerah. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode I (satu) tahun.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menetapkan sasaran dalam periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Hidup Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Layanan Publik Perangkat Daerah;

3. Indikator Kinerja Sasaran

Penetapan indikator kinerja sasaran Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029.

Pencapaian indikator kinerja sasaran ditunjukkan dengan pencapaian *outcome* program Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap

tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada priode Rencana Strategis dapat dicapai.

4. Target Tahunan

Dalam melaksanakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur Dinas Sosial Provinsi menetapkan target Tahunan dan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.1. Target Tahunan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	JENIS INDIKATOR KINERJA	SASARAN STRATEGIS	REALISASI 2024	TARGET					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan Fungsi dan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS)	Tujuan	Peningkatan kemampuan individu dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan keberfungsian sosial, serta mengurangi angka kemiskinan	57.96	58.46	59.26	59.76	60.26	60.76	61.06
	Persentase Tertanganinya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Sasaran	Meningkatkan Kualitas Hidup Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	12	12	10	10	10	10	10
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Sasaran	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Layanan Publik Perangkat Daerah	75.55	76.55	78.55	81.1	83.4	85.8	87.1
	Indeks Kepuasan Masyarakat Daerah	Sasaran		82	84	85	86	87	88	89

Adapun untuk melihat program / kegiatan untuk mencapai tujuan / sasaran disajikan pada table dibawah ini:
Tabel 2.2. Program dan Kegiatan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
MENINGKATKAN FUNGSI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)	MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)	Persentase Tertanganinya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 10% Tahunan	Program Pemberdayaan Sosial	Pesentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Rekomendasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah izin PUB melalui aplikasi online yang tertata dengan baik dan sesuai aturan
				Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Provinsi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
				Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
				Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai St			Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keprintisan Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keprintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
				Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Perseorangan kewenangan provinsi

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan dalam dan luar negeri yang mendapatkan pelayanan pemulangan	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase peningkatan PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam PantI (%)	Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam PantI	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	Penyediaan Permakanan Penyediaan Sandang Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Pemulangan ke Daerah Asal Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
							Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi
							Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya
							Pelaksanaan Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah
					Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi
							Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi
							Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi
							Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
							Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan didalam Panti Kewenangan Provinsi
							Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi
							Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi
							Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi
							Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi
							Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi
							Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlanta	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi
							Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi
							Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
					Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi
							Penyediaan Sanding	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi
							Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi
							Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi
							Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi
							Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi
							Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi
							Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi
							Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi
							Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
							Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis
							Pemulasaraan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi
							Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi
							Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi
							Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi
							Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi
							Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
							Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi
							Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi
							Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi
							Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi
							Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi
							Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi
							Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi
							Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi
							Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
							Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dikoordinasikan dan Disinkronisasikan dalam Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas serta dibina sesuai dengan Kewenangannya.
							Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi
							Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi
							Pemulasaraan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi
							Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
					Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis (KDRT), Korban Tindak Kekerasan (KTK), dan Trafficking yang dibina, dilayani, dilindungi di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi
							Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersediadalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi
							Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi
							Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan didalam Panti Kewenangan Provinsi
							Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi
							Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi
							Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi
							Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi
							Pemulangan Ke Daerah Asal	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
							Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi
							Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi
							Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi
							Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan
							Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	Pengangkatan Anak Antar WNI	Jumlah Anak yang mendapatkan Orang tua Asuh/Orang Tua Angkat sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan Provinsi

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
							Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan Provinsi
				Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengentasan dan Penanganan Kemiskinan Kewenangan Provinsi	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Provinsi
				Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin			Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan data, Monev dan Rapat Koordinasi
							Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan Provinsi
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Kegiatan Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana	Penyediaan Perma Kanan	Jumlah Pengungsi yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam masa tanggap darurat kewenangan Provinsi
							Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi
							Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Kapasitas Tempat pennampungan pengungsi Kewenangan Provinsi

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
				Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)			Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang yang mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi
				Persentase Korban Bencana yang Mendapat Layanan Pemulihan Sosial			Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Provinsi
							Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya
							Sosialisasi dan Edukasi Penanganan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi Penanganan Bencana
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah Taman Makam Pahlawan Yang Meningkatkan Tata Kelolanya	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Lokasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan
							Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
							Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Tenaga pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN LAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan / Dokumen Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
							Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
							Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD
							Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
							Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
							Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan pada Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian dalam menunjang administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
							Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
							Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
				Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pembuatan Laporan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
							Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
							Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)
							Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Prov. Kaltim	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
							Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan indikator kinerja utama Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026.

Pencapaian indikator kinerja utama ditunjukkan dengan pencapaian *outcome* program Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada priode Rencana Strategis dapat dicapai. Adapun indikator kinerja yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Penjelasan (Formulasi Pehitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatkan Kualitas Hidup Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Tertanganinya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Mengukur terpenuhinya kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya melalui upaya-upaya Pemberdayaan, Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial.	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang ditangani}}{\text{Jumlah Populasi PPKS}} \times 100 \%$	Laporan Instansi Sosial Kab/Kota, SKPD Bidang Kesejahteraan Sosial, Laporan UPTD dan laporan kinerja bidang teknis serta Badan Pusat Statistik (BPS), serta sumber lain yang valid.	Dinas Sosial Prov. Kaltim
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Mengukur Peningkatan Nilai dari Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Setiap Tahunnya.	Perhitungan Nilai SAKIP di lakukan oleh Inspektorat Daerah Prov. Kaltim	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP), dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Dinas Sosial Prov. Kaltim.	Dinas Sosial
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Mengukur Skor Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Prov. Kaltim	Melalui Kuisisioner dan Instrumen yang di Sebar kepada Masyarakat yang dilayani Oleh Dinas Sosial Prov. Kaltim	Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan dan TKSK yang berada di Lapangan.	Dinas Sosial Prov Kaltim

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja tahun 2025 dilakukan berdasarkan ketersediaan anggaran yang dilakukan oleh TAPD yang kemudian dilakukan penyesuaian target yang terdapat dalam Renstra dan RPJMD 2025 – 2029, untuk tahun 2025 telah ditetapkan penetapan kinerja sebagaimana ikhtisar di bawah ini:

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Prov. Kaltim

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan Kualitas Hidup Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Tertanganinya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	12
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah;	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	BB
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	84

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan Hasil Evaluasi dan Implementasi Sistem LkjIP Tahun 2024.

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024:

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

Adapun nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

NO.	KOMPONAN YANG NILAI	BOBOT	NILAI 2019	NILAI 2020	NILAI 2021	NILAI 2022		NILAI 2023	NILAI 2024	
						BOBOT	NILAI		BOBOT	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Perencanaan Kinerja	30%	23,05	24,07	24,29	30%	25,50	27,00	30%	26.60
2	Pengukuran Kinerja	25%	17,82	18,75	19,06	20%	14,20	15,40	30%	21.30
3	Pelaporan Kinerja	15%	10,97	10,97	10,97	10%	5,90	5,90	15%	10.65
4	Evaluasi Kinerja	10%	5,49	5,70	5,70	20%	11,00	19,00	10%	19.00
5	Capaian Kinerja	20%	11,44	11,50	13,13	20%	14,80	14,80	-	-
Nilai Hasil Evaluasi			68,77	70,99	73,15		71,40	82,10		75.55
Kategori Penilaian			B	BB	BB		BB	A		BB

2. Tidak lanjut atas hasil Evaluasi Insp

3. ektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP.

Adapun tindak lanjut dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

3.1. Perencanaan Kinerja

Agar Evaluasi terkait dokumen perencanaan indikator kinerja dapat mengacu kepada ukuran SMART yaitu :

- Specific (Spesifik) Tujuan harus jelas, detail, dan tidak ambigu. Hindari tujuan yang terlalu umum atau vagues;

- Measureable (Terukur) Tujuan harus dapat diukur atau dievaluasi. ini memungkinkan untuk melacak kemajuan dan menentukan apakah tujuan tercapai atau tidak;
- Achievable (Dapat (Dicapai) Tujuan harus realistis dan dapat dicapai dengan upaya yang wajar. Hindari tujuan ambisius atau tidak mungkin dicapai;
- Relevant (Relevan) Tujuan harus relevan dengan tujuan utama atau sasaran yang lebih luas;
- Time Bond (Berbasis Waktu) Tujuan harus memiliki tenggat waktu yang jelas. Ini menciptakan rasa urgensi dan membantu dalam melacak kemajuan.

Tindak Lanjut :

Dalam penyusunan Dokumen Laporan Rencana Kerja (RENJA) 2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) 2025-2029, LKJIP dan Laporan lainnya akan lebih memperhatikan dalam tata naskah penulisan, keselarasan Tujuan yang harus lebih detail, dapat terukur, sasaran kinerja dan target kinerja yang lebih realistis agar dapat tercapai serta indikator-indikator yang mengacu pada pengukuran SMART. Pada Dokumen RENJA 2026 dan RENSTRA 2025-2029 sudah dilakukan evaluasi review dokumen oleh Inspektorat beserta BAPPEDA dan telah dinyatakan sudah dalam kategori **SMART**.

3.2. Pengukuran Kinerja

Agar meningkatkan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja untuk lebih optimal.

Tindak Lanjut :

Dalam penyusunan dokumen Laporan RENJA dan RENSTRA akan melakukan perhitungan penyusunan anggaran yang efektif guna efisiensi anggaran terkait pelaksanaan kegiatan untuk mencapai kinerja yang optimal.

3.3. Pelaporan Kinerja

- a. Agar dokumen laporan kinerja lebih banyak menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasikinerja di level provinsi/nasional/internasional;
- b. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kerja (belum terdapat contoh konkret adanya perubahan budaya kerja).

Tindak Lanjut :

- a. Akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka perbandingan realisasi kinerja;
- b. Akan meningkatkan sosialisasi dan implementasi terkait informasi dalam laporan kinerja guna memberikan pengaruh dalam peningkatan budaya kerja, Pada tahun 2025 capaian budaya kerja Dinas Sosial Provinsi meningkat dari tahun sebelumnya yang disebabkan adanya peningkatan implementasi SAKIP

3.4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Agar Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan oleh SDM yang memadai dengan semakin banyak personel diikutsertakan dalam diklat, bimtek dan sosialisasi;
- b. Agar Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ditindaklanjuti seluruhnya.

Tindak Lanjut :

- a. akan meningkatkan kompetensi pegawai terkait evaluasi akuntabilitas internal melalui bimtek, Pada Tahun 2025 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur sudah melakukan peningkatan kompetensi pegawai melalui Diklat dan Bimtek;
- b. Akan menindaklanjuti hasil rekomendasi secara menyeluruh.

Agar Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dapat melakukan inovasi terhadap aspek Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang layak menjadi percontohan di Pemerintah Provinsi Kaltim.

Tindak Lanjut :

Akan berupaya melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja.

B. Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya dari hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan penetapan Rencana Kinerja Tahunan 2025, yang merupakan Implementasi Rencana Strategis 2024-2026, Sedangkan capaian kinerja (*performance results*) selama Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja Dinas Sosial Prov. Kaltim Tahun 2025 Per Triwulan.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULANAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kualitas hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Tertanganinya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)12% pertahun	Persen	12	Triwulan I	2	2.94	147
					Triwulan II	7	8.90	127.14
					Triwulan III	1	1.03	103
					Triwulan IV	2	0.64	32
JUMLAH				12		12	13.51	112.58
2	Meningkatkan Nilai dari Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Prov. Kaltim	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	BB	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	BB	A	110

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULANAN	TARGET	REALISASI	%
3	Meningkatkan Skor Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Dinas Sosial Prov. Kaltim	Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM)	Persen	86,10	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	86,10	86,50	100.46
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	86,10	86,71	100.70
JUMLAH				86,10		86,10	86,71	100.70

C. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur adalah Meningkatkan Kualitas Hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.

Realisasi Kinerja Dinas Sosial Prov. Kaltim Tahun 2025 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3. Pengukuran Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Tertanganinya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 12 % setahun	Persen	12	13.51	112.58
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	BB	A	110
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	86.10	86.71	100.70

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun 2025

Adapun perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Dinas Sosial Prov. Kaltim dengan beberapa tahun lalu dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI						%PENINGKATAN / PENURUNAN
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9+8+7+6+5+4) / 6*100%
1	Tertanganinya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 12 % setahun	Persen	1.23	1.47	1.08	1,69	1.78	13.02	309.66%

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 ini dengan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya mengalami kenaikan dan penurunan serta adanya perubahan target pada tahun 2024 dimana sasaran target indikator kinerja adalah Tertanganinya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 12 % setahun, adapun jumlah capaian keseluruhan sampai dengan tahun 2024 adalah 309.66% pada tahun 2025 telah mengikuti RPJMD dan RENSTRA yang terbaru yaitu periode 2024-2026 dimana target dan indikator telah berubah sesuai dengan Renstra Dinsos Prov. Kaltim

3. Perbandingan Realisasi Kinerja.

Adapun Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Realisasi dan Capaian RPJMD (RENSTRA) 2024-2026 dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Capaian Realisasi Kinerja Dinas Sosial Prov Kaltim Tahun 2025

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI TAHUN 2024	TINGKAT KEMAJUAN / KEMUNDURAN
1	Tertanganinya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 12 % setahun	Persen	12	13.51	0.49

Tabel 3.6 Capaian Realisasi Indikator Makro Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur (RPD Perubahan) 2024 -2026.

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI S/D TAHUN 2025	TINGKAT KEMAJUAN/ KEMUNDURAN
1	Tingkat Kemiskinan	Persen	5.55	5,19	(0.36)

*Sumber data BPS Prov. kaltim

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dengan LKJIP Provinsi Kaltim.

NO.	NILAI SAKIP PROVINSI	SATUAN	NILAI SAKIP DINSOS PROV. KALTIM	TINGKAT KEMAJUAN/ KEMUNDURAN
1	78,74	Persen	75.55	3,19

*Sumber data Laporan LKJIP Prov. kaltim

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan.

Capaian kinerja pada tahun ini melebihi dengan target awal RPD atau yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Prov. Kaltim yaitu 12% hal ini di sebabkan oleh adanya pemberian bantuan tambahan melalui APBD Perubahan yang dimana menyebabkan melebihi dari target awal serta adanya pemulangan orang terlantar yang melebihi dari target.

Disamping itu fokus utama dana APBD sesuai dengan SPM Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur adalah meningkatkan penanganan dan pelayanan Sosial pemerintah provinsi Kalimantan Timur didukung oleh 6 UPTD yang berfungsi sebagai unit-unit pelayanan Sosial penanganan PPKS dalam panti diantaranya UPTD Panti Sosial Tresna Wherda Nirwana Puri (126 orang), UPTD Panti Sosial Bina Remaja (105 orang) yang berfungsi melaksanakan pelayanan dan bimbingan keterampilan bagi remaja dan putus sekolah, UPTD Panti Sosial Anak Harapan (100 anak) dan UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma (80 anak) berfungsi melaksanakan pelayanan bagi anak yatim piatu, anak terlantar anak yang berhadapan dengan masalah hukum dan yang terakhir yaitu UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Harapan Mulia (100 klien) berfungsi melaksanakan pelayanan

bagi Gelendangan Pengemis dan Tuna Sosial, korban *human trafficking* serta UPTD Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama (80) Orang yang berfungsi sebagai unit pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar.

5. Analisis Program / Kegiatan / Sub Kegiatan.

Untuk mencapai Pengukuran Kinerja Utama Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dilakukan terhadap penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menjadi 'core' penanganan bidang Kesejahteraan Sosial tahun 2025 meliputi:

- a. Pemberian Bantuan Sosial untuk Masyarakat Miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dengan target bantuan untuk tahun 2025 sebanyak 4.500 Orang dan terealisasi sebanyak 4.680 Orang atau dengan tingkat capaian 104%, capaian melebihi dari target karena adanya penambahan 180 orang pada anggaran perubahan;
- b. Pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk Pemenuhan Kebutuhan dasar bagi Klien LKS/Panti Swasta dengan target bantuan untuk tahun 2025 yaitu 7.300 Orang dan terealisasi sebanyak 6.981 orang dengan Tingkat capaian 95.63% pemberian bantuak tidak 100 persen karena ada beberapa LKS yang tidak dapat memenuhi kriteria pemberian bantuan baik dari izin operasional maupun tidak bisa dalam proses pengajuan pada aplikasi SIPD;
- c. Pemberian Bantuan serta pemulangan orang terlantar pada Bidang Rehabilitasi Sosial dengan target bantuan untuk tahun 2025 yaitu 620 Orang dan terealisasi sebanyak 750 orang dengan Tingkat capaian 120.96%, pada kegiatan ini melebihi dari target karena adanya pemulangan orang terlantar yang banyak dilaksanakan pada tahun 2025 dengan bekerjasama Bersama basnaz, dinsos kab/kota dan instansi terkait;

- d. Pemberian bantuan Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial sebesar 17,870 Orang. Pada tahun 2025 direncanakan sebanyak 17,870 paket bantuan bagi korban bencana dan terealisasi kepada 18.193 Orang dengan Tingkat capaian kinerja 101.81%;
- e. Pemberian bantuan berupa rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia terlantar di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri (PSTW-NP) dengan target klien 126 orang dan terealisasi sebanyak 130 orang dengan Tingkat capaian 103.17% penyebab lebihnya realisi dari target karena adanya rehabilitasi Gedung asrama bagi klien sehingga dalam menambah jumlah klien yang di rehabilitasi;
- f. Pemberian bantuan berupa rehabilitasi Sosial bagi Anak terlantar di UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma (PSPAD) dengan target klien 80 orang dan terealisasi sebanyak 80 orang dengan Tingkat capaian 100%;
- g. Pemberian bantuan berupa rehabilitasi Sosial bagi Anak terlantar di UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan (PSAAH) dengan target klien 100 orang dan terealisasi sebanyak 100 orang dengan Tingkat capaian 100%;
- h. Pemberian bantuan berupa rehabilitasi Sosial bagi Anak dan remaja terlantar di UPTD Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) dengan target klien 85 orang dan terealisasi sebanyak 97 orang dengan Tingkat capaian 114,11%, capaian melebihi dari target karena adanya tambahan dari rehabilitasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH);
- i. Pemberian bantuan berupa rehabilitasi Sosial bagi gelandangan dan Pengemis di UPTD Panti Rehababilitasi Sosial Tuna Sosial Harapan Mulia (RPSTS-HM) dengan target klien 60 orang dan terealisasi sebanyak 233 orang dengan Tingkat capaian 388% yang disebabkan banyaknya rehabilitasi bagi gelandangan dan pengemis di Kaltim;

- j. Pemberian bantuan berupa rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar di UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama dengan target klien 50 orang dan terealisasi sebanyak 37 orang dengan Tingkat capaian 74% kurang maksimalnya dalam pelayanan yang disebabkan masih dalam proses perpindahan klien uptd menuju ke panti baru;

Berdasarkan penanganan tersebut, disamping Program dan Kegiatan lain yang tidak berdampak langsung terhadap PPKS, maka dapat disimpulkan dengan mengacu pada formula dalam pengukuran capaian kinerja jumlah PPKS yang tertangani yaitu sebanyak 30.791 Orang dibagi dengan jumlah populasi PPKS Provinsi Kalimantan Timur yang berjumlah 231.437 Jiwa. Adapun terdapat capaian kinerja tahun 2025 adalah **13.51%**

- **Permasalahan**

Sasaran pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah perorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat yang mengalami dan rentan terkena masalah Kesejahteraan Sosial meliputi kemiskinan, keterlantaran, ketunaan Sosial, kecacatan, keterasingan dan keterpencilan serta korban bencana yang secara operasional disebut dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Secara umum kendala dan permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dalam mengimplementasikan Program-Program Kesejahteraan Sosial antara lain meliputi :

1. Perpindahan Ibukota Negara (IKN) di Kalimantan Timur akan berdampak bagi kehidupan sosial masyarakat sehingga berpotensi memunculkan permasalahan baru yaitu bertambahnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);

2. Belum maksimalnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang terintegrasi dan berbasis Data;
3. Belum maksimalnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang terintegrasi dan berbasis Data;
4. Belum maksimalnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang terintegrasi dan berbasis Data;
5. Belum maksimalnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang terintegrasi dan berbasis Data;
6. Terbatasnya jumlah, Kemampuan dan Kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial;
7. Meningkatnya potensi Bencana (alam dan sosial) dalam beberapa tahun terakhir berpotensi munculnya PPKS baru, sehingga perlunya peningkatan bantuan logistik bencana bagi korban bencana (Alam dan Sosial).

- **Pemecahan Masalah**

Adapun pemecahan masalah yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah :

1. Meningkatkan sinkronisasi dan sistem pelaporan kinerja Dinas-Dinas / Instansi Sosial Kab/Kota se Kaltim;
2. Mengoptimalkan anggaran berdasarkan Program-Program skala prioritas dan mendorong peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan pelayanan kepada PPKS serta mendorong peran aktif dunia usaha melalui CSR;
3. Meningkatkan dan mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait dalam memantau para pendatang baru dengan memperketat pengawasan disetiap akses pintu masuk di wilayah provinsi Kalimantan Timur;
4. Penajaman Program-Program kesejahteraan Sosial yang berhubungan langsung masyarakat miskin seperti peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan

melaksanakan serta mengikut sertakan pegawai yang ada dilingkup dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur pada setiap Kegiatan pelatihan/diklat baik ditingkat daerah maupun nasional.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi dilakukan terhadap kinerja yang sudah efektif atau ketercapaian 100%. Adapun analisis efisiensi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.8. Analisis Efisiensi Sumber Daya Dinas Sosial

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA ($\geq 100\%$)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6 (4-5)
1	Meningkatnya Kualitas Hidup bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).	Tertanganinya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 12 % pertahun	112.58	90.99	(21.59)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur adalah 21.59% yang didapatkan dari perbandingan kembali hasil output dan input hasil capaian kinerja dan penyerapan Anggaran.

D. Realisasi Anggaran

Capain Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur tidak terlepas dari dukungan anggaran yang diterima baik yang bersumber dari dana APBD Provinsi Kalimantan Timur.

1. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Tabel 3.9. Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI APBD	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tertanganinya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 12 % setahun	12%	13.51%	112.58%	Samarinda, Balipapan, Bontang, Kukar, Kubar, Kutim, Paser, Berau dan Mahulu.	Rp. 127,358,736,050	90.97%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi yaitu 112.58% dan tingkat capaian Keuangan sebesar 90.97%.

2. Realisasi anggaran per Program dan Kegiatan

- Realisasi Anggaran APBD

Secara keseluruhan Realisasi Anggaran APBD Januari sampai dengan Desember tahun 2024 sebesar Rp. 127,358,736,050 dari total anggaran sebesar Rp. 140.000.194.781 atau sebesar 90.97%, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran APBD

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran			Ket
			lokasi	Realisasi	%	
1	2		3	5	6	7
1.	DINAS			101,998,376,317	89.88	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		SAMARINDA	56,421,847,120	85.32	
	a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	531,529,105	82.16	
	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	310,558,385	86.36	
	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Samarinda	41,480,500	97.37	
	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Samarinda	16,800,000	96.55	
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Samarinda	107,907,795	67.9	
	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	54,782,425	80.08	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran			Ket
			lokasi	Realisasi	%	
1	2		3	5	6	7
	b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	41,592,098,501	83.20	
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	40,891,919,001	99.23	
	-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	487,890,000	97.13	
	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	81,073,500	94.48	
	-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Samarinda	8,327,000	72.08	
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Samarinda	83,579,000	98.08	
	-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Samarinda	39,310,000	97.12	
	c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Samarinda	11,484,020	94.98	
	-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	4,027,000	99.02	
	-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	3,670,000	92.72	
	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Samarinda	3,787,020	93.12	
	d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	118,044,202	100	
	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	-	0	
	-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Samarinda	16,183,000	91.00	
	-	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Samarinda	101,861,202	100	
	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	-	0	
	e	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	3,290,332,922	98.12	
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	72,879,136	98.23	
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	1,650,671,981	97.83	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran			Ket
			lokasi	Realisasi	%	
1	2		3	5	6	7
	-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	325,919,623	98.50	
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	934,716,116	98.53	
	-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Samarinda	102,040,066	94.87	
	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Samarinda	204,106,000	99.68	
f		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	810,024,093	97.10	
	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	0	0	
	-	Pengadaan Mebel	Samarinda	463,987,015	98.44	
	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	346,037,078	95.37	
g		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	8,557,183,050	89.02	
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	41,280,000	88.65	
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	674,070,592	89.82	
	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	5,900,000	98.42	
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	7,835,932,458	88.95	
h		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	1,511,151,227	96.48	
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	472,908,655	97.82	
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	173,563,673	99.55	
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	405,247,952	90.55	
	-	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Samarinda	28,520,000	99.72	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran			Ket
			lokasi	Realisasi	%	
1	2		3	5	6	7
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	186,266,947	99.51	
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	244,644,000	98.91	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		SAMARINDA	1,041,414,550	99.57	
	a.	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10 KAB/KOTA	81,077,997	99.84	
	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10 KAB/KOTA	81,077,997	99.84	
	b	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Samarinda	960,336,553	99.55	
	-	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Samarinda	151,546,240	99.53	
	-	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Samarinda	247,303,940	100	
	-	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Samarinda	67,155,940	95.04	
	-	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Samarinda	494,330,433	97.32	
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		10 KAB/KOTA	18,370,961,817	97.43	
	a	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	SAMARINDA	1,435,124,909	85.74	
	-	Penyediaan Permakanan	Samarinda	955,348,471	80.06	
	-	Penyediaan Sandang	Samarinda	245,021,150	99.97	
	-	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Samarinda	26,903,780	99.99	
	-	Penyediaan Alat Bantu	Samarinda	2,450,760	100	
	-	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Samarinda	22,810,000	99.95	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran			Ket
			lokasi	Realisasi	%	
1	2		3	5	6	7
	-	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Samarinda	19,200,000	100	
	-	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Samarinda	94,210,448	99.39	
	-	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas	Samarinda	510,000	100	
	-	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Samarinda	8,500,000	100	
	-	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Samarinda	37,772,300	99.93	
	-	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Samarinda	12,540,000	99.52	
	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas	Samarinda	9,858,000	100	
	b	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	10 Kab/Kota	16,935,836,908	98.57	
	-	Penyediaan Permakanan	10 Kab/Kota	14,071,982,000	98.4	
	-	Penyediaan Sandang	10 Kab/Kota	442,036,949	99.46	
	-	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	10 Kab/Kota	168,709,200	99.97	
	-	Pemberian Bimbingan Keterampil Dasar	10 Kab/Kota	351,557,280	100	
	-	Pemulangan ke Daerah Asal	10 Kab/Kota	668,923,021	99.87	
	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	10 Kab/Kota	1,232,628,458	99.92	
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		10 KAB/KOTA	17,366,941,970	93.62	
	a.	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	10 Kab/Kota	95,715,885	87.96	
	-	Pengangkatan Anak antar WNI	10 Kab/Kota	83,660,885	88.31	
	-	Pengangkatan Anak oleh Orang Tunggal	10 Kab/Kota	12,055,000	85.62	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran			Ket
			lokasi	Realisasi	%	
1	2		3	5	6	7
	b	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	10 Kab/Kota	17,271,226,085	93.63	
	-	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	10 Kab/Kota	8,890,500,000	89.05	
	-	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Kab/Kota	275,395,766	93.04	
	-	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	10 Kab/Kota	8,105,330,319	99.30	
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		10 KAB/KOTA	8,086,612,840	99.14	
	a	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	10 Kab/Kota	8,086,612,840	99.14	
	-	Penyediaan Permakanan	10 Kab/Kota	6,256,064,000	99.05	
	-	Penyediaan Sandang	10 Kab/Kota	332,270,355	99.84	
	-	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	10 Kab/Kota	562,263,500	99.87	
	-	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	10 Kab/Kota	179,803,500	99.87	
	-	Pelayanan Dukungan Psikososial	10 Kab/Kota	756,211,485	98.83	
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		SAMARINDA	710,598,020	95.18	
	a	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Provinsi	Samarinda	710,598,020	95.18	
	-	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Samarinda	418,564,131	92.49	
	-	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Samarinda	74,593,889	97.39	
	-	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Samarinda	217,440,000	100	
2	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PUTRI (PSTW-NP)			7,001,112,941	98.60	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		SAMARINDA	1,383,151,720	96.20	
	a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	76,680,000	100	
	-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	76,680,000	100	
	b	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	0	0	
	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	-	0	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran			Ket
			lokasi	Realisasi	%	
1	2		3	5	6	7
	c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	357,696,876	98.87	
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	29,614,000	94.30	
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	200,802,576	99.89	
	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Samarinda	33,580,300	100.00	
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	93,700,000	99.95	
	d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	149,235,504	99.40	
	-	Pengadaan Mebel	Samarinda	118,801,080	99.70	
	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	30,434,424	98.27	
	e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	517,080,700	92.39	
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	294,411,800	87.52	
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	222,668,900	99.73	
	f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	282,458,640	97.55	
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	173,556,640	96.13	
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	78,948,000	99.92	
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	29,954,000	99.85	
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		10 KAB/KOTA	5,617,961,221	99.21	
	a	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	SAMARINDA	5,617,961,221	99.21	
	-	Penyediaan Permakanan	Samarinda	2,743,631,900	99.65	
	-	Penyediaan Sandang	Samarinda	134,769,160	99.96	
	-	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Samarinda	959,026,303	98.81	
	-	Penyediaan Alat Bantu	Samarinda	11,602,715	99.14	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran			Ket
				lokasi	Realisasi	%	
1	2			3	5	6	7
		-	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Samarinda	60,826,629	99.69	
		-	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Samarinda	569,984,257	98.32	
		-	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Samarinda	999,005,000	98.74	
		-	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Bagi Lanjut usia Terlantar	Samarinda	680,000	65.91	
		-	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Samarinda	6,000,000	100	
		-	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Samarinda	41,993,757	99.99	
		-	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Samarinda	8,240,000	98.10	
		-	Pemulasaran	Samarinda	82,201,500	99.91	
3	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA (PSPAD)				4,637,020,791	92.26	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			SAMARINDA	1,625,838,221	91.12	
	a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Samarinda	73,380,000	97	
		-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	73,380,000	96.81	
	b	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Samarinda	0	0	
		-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	-	0	
	c	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Samarinda	286,170,694	99.19	
		-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	15,314,550	98.72	
		-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	168,468,144	98.83	
		-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Samarinda	10,700,000	98.71	
		-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	91,688,000	100	
	d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Samarinda	122,793,750	98.70	
		-	Pengadaan Mebel	Samarinda	122,793,750	98.70	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran			Ket
			lokasi	Realisasi	%	
1	2		3	5	6	7
	e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	862,695,089	85.13	
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	3,274,000	97.09	
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	196,661,089	54.04	
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	662,760,000	99.62	
	f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	280,798,688	99.51	
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	194,190,088	99.59	
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	57,608,600	99.44	
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	29,000,000	99.15	
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		10 KAB/KOTA	3,011,182,570	99.29	
	a	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	SAMARINDA	3,011,182,570	99.29	
	-	Pengasuhan	Samarinda	19,862,000	99.95	
	-	Penyediaan Permakanan	Samarinda	1,728,361,400	99.50	
	-	Penyediaan Sandang	Samarinda	761,666,130	98.69	
	-	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Samarinda	121,156,500	97.98	
	-	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Samarinda	9,605,000	99.67	
	-	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Samarinda	62,520,000	99.98	
	-	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Samarinda	114,000,000	100	
	-	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Identitas Anak	Samarinda	3,086,000	98.28	
	-	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Samarinda	161,094,500	99.99	
	-	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Samarinda	8,399,580	100	
	-	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Samarinda	8,341,260	99.30	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran			Ket
			lokasi	Realisasi	%	
1	2		3	5	6	7
	-	Akses Ke Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Pengganti	Samarinda	4,200,000	100	
	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Samarinda	8,890,200	99.89	
4	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN (PSAAH)			5,646,700,191	93.62	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		SAMARINDA	1,680,930,609	95.69	
	a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	76,680,000	100	
	-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	76,680,000	100	
	b	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	0	0	
	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	-	0	
	c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	580,016,096	95.35	
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	32,156,700	97.81	
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	459,176,045	94.88	
	-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	19,117,500	89.74	
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	69,565,851	99.13	
	d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samarinda	5,661,000	98.70	
	-	Pengadaan Mebel	Samarinda	5,661,000	92.45	
	e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	735,750,516	94.82	
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	6,571,500	95.59	
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	218,160,016	91.00	
	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	94,519,000	83.77	
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	416,500,000	100	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran			Ket
			lokasi	Realisasi	%	
1	2		3	5	6	7
	<i>f</i>	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	282,822,997	82.12	
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	219,581,997	96.64	
		- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	24,280,000	99.63	
		- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	38,961,000	99.90	
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		10 KAB/KOTA	3,965,769,582	92.77	
	<i>a</i>	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	SAMARINDA	3,965,769,582	92.77	
		- Pengasuhan	Samarinda	5,100,000	98.08	
		- Penyediaan Permakanan	Samarinda	2,192,881,621	96.70	
		- Penyediaan Sandang	Samarinda	594,053,019	99.33	
		- Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Samarinda	412,935,510	91.68	
		- Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Samarinda	416,117,823	99.00	
		- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Samarinda	158,213,440	98.71	
		- Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Samarinda	11,994,000	99.93	
		- Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Identitas Anak	Samarinda	2,372,000	100	
		- Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Samarinda	104,044,080	36.05	
		- Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Samarinda	17,025,000	99.85	
		- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Samarinda	17,050,000	100.00	
		- Akses Ke Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Pengganti	Samarinda	4,331,000	97.33	
		- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Samarinda	29,652,089	94.94	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran			Ket
			lokasi	Realisasi	%	
1	2		3	5	6	7
5	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA (PSBR)			5,304,371,283	99.61	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		SAMARINDA	1,680,640,603	99.71	
	a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	76,680,000	100	
	-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	76,680,000	100	
	b	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	0	0	
	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	-	0	
	c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	352,256,210	99.04	
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	46,961,844	99.61	
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	188,203,786	98.37	
	-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	15,532,500	99.72	
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	101,558,080	99.69	
	d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samarinda	1,512,000	97.78	
	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Gedung Lainnya	Samarinda	1,512,000	97.78	
	e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	883,102,859	99.94	
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	9,947,600	99.92	
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	204,515,259	99.85	
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	668,640,000	99.97	
	f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	367,089,534	99.75	
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	105,244,534	99.93	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran			Ket
				lokasi	Realisasi	%	
1	2			3	5	6	7
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Samarinda	69,680,000	99.90	
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Samarinda	192,165,000	99.98	
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Samarinda	0	0.00	
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			10 KAB/KOTA	3,623,730,680	99.56	
	a	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti		SAMARINDA	3,623,730,680	99.56	
	-	Pengasuhan		Samarinda	30,300,000	99.89	
	-	Penyediaan Permakanan		Samarinda	1,452,057,923	99.98	
	-	Penyediaan Sandang		Samarinda	561,314,500	98.46	
	-	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses		Samarinda	374,458,436	99.69	
	-	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti		Samarinda	32,887,000	99.96	
	-	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		Samarinda	381,481,040	99.30	
	-	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari		Samarinda	742,612,281	99.60	
	-	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Identitas Anak		Samarinda	4,717,000	100	
	-	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Samarinda	1,530,000	94.93	
	-	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Samarinda	20,972,500	99.87	
	-	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Samarinda	21,400,000	100	
6	UPTD PANTI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL HARAPAN MULIA (PRSTS-HM)				2,771,154,527	85.60	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			SAMARINDA	1,196,089,091	98.74	
	a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Samarinda	33,360,000	100	
	-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Samarinda	33,360,000	100	
	b	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Samarinda	32,898,060	99.89	
	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Samarinda	32,898,060	99.89	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran			Ket
			lokasi	Realisasi	%	
1	2		3	5	6	7
	c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	183,232,395	99.66	
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	4,766,000	99.76	
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	102,853,895	99.43	
	-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	2,550,000	99.68	
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	73,062,500	99.97	
	d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	707,991,603	98.00	
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	101,777,503	97.17	
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	606,214,100	98.14	
	e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	238,607,033	99.94	
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	98,117,234	99.89	
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	67,141,299	100.00	
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	73,348,500	99.95	
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		10 KAB/KOTA	1,575,065,436	77.75	
	a	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	SAMARINDA	1,575,065,436	77.75	
	-	Penyediaan Permakanan	Samarinda	967,684,460	68.31	
	-	Penyediaan Sandang	Samarinda	233,257,651	99.22	
	-	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Samarinda	31,268,400	100	
	-	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Samarinda	8,870,000	100.00	
	-	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Samarinda	82,880,000	100.00	
	-	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Samarinda	21,355,325	100.00	
	-	Pemberian Bimbingan Keterampil Dasar	Samarinda	194,130,000	99.98	

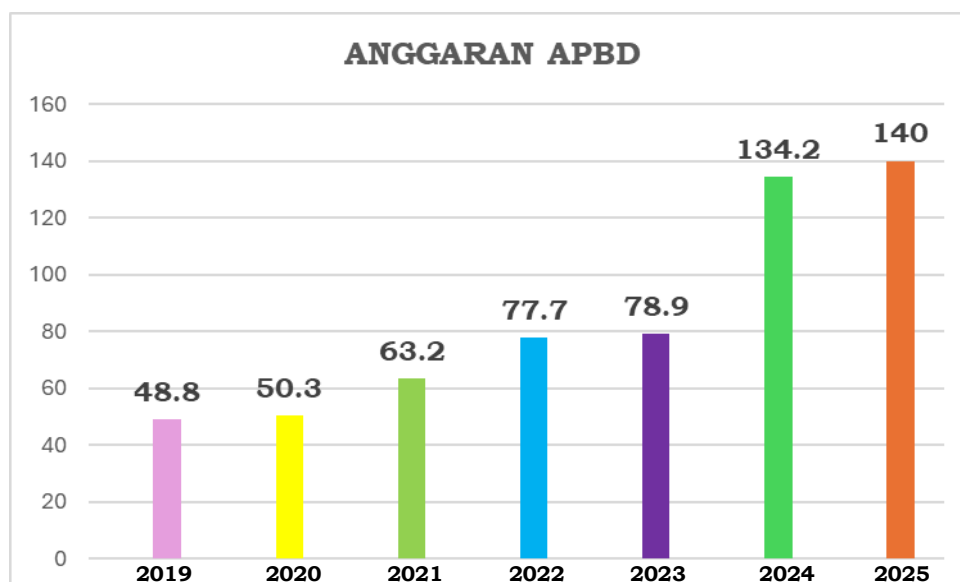
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran			Ket
				lokasi	Realisasi	%	
1	2			3	5	6	7
		-	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiramn, Surat Nikah dan atau Identitas Anak	Samarinda	510,000	100	
		-	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Samarinda	10,200,000	100	
		-	Pemulangan ke Daerah Asal	Samarinda	24,909,600	100	
JUMLAH KESELURUHAN DINAS DAN UPTD					127,358,736,050	90.97	

Berdasarkan tabel diatas secara keseluruhan capaian Anggaran APBD Tahun 2025 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar Rp. 127,358,736,050,00 (90.97%)

- Perkembangan jumlah anggaran

Capaian kinerja Dinas Sosial Prov. Kalimantan Timur sangat dipengaruhi oleh besaran jumlah Anggaran yang diterima setiap Tahunnya. Untuk mengetahui perkembangan jumlah anggaran Dinas Sosial Prov. Kalimantan Timur dari tahun 2019 – 2025 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.1. Perkembangan dan Jumlah Anggaran APBD Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur periode 2019 – 2025.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penanganan Permasalahan Sosial tidak dapat diselesaikan tanpa adanya proses Perencanaan yang tidak terpadu untuk menghasilkan Program dan Kegiatan guna pencapaian tujuan Penanganan PPKS. Kegiatan secara integral baik Program dan Kegiatan yang bersumber baik melalui APBD untuk mencapai Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagai bagian penutup dari LkjIP Tahun 2025 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 telah tercapai, hal ini ditandai dengan beberapa sasaran yang telah ditetapkan menunjukkan angka pencapaian yang sangat signifikan.

Demikian pula dengan Capaian Kinerja pada Tahun 2025 juga menunjukan tingkat keberhasilan disebabkan oleh tercapainya seluruh Kegiatan yang bersifat Operasional. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa seluruh capaian kinerja tersebut diatas, baik yang berhasil maupun yang belum berhasil, telah memberikan pelajaran, berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja mendatang agar lebih efisien dan efektif dalam memanfaatkan seluruh potensi yang ada di lingkup Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur baik dari segi Sumber Daya Manusia / Aparatur maupun Dana Anggaran yang ada untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

B. SARAN

Dengan dibuatnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LkjIP) ini di harapkan dapat memacu pelaksanaan *Good Governance* dan *Clean Government* yang melibatkan seluruh *Stakeholder*, sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan.

Kami Pimpinan beserta segenap aparatur dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur mengharapkan agar LkjIP Tahun 2025 ini dapat memenuhi kewajiban Akuntabilitas kami kepada para *stakeholder* dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Ini dibuat sebagai bentuk transparansi dan pertanggung jawaban kami terhadap masyarakat.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua. Aamiin.

Kepala,



Drs. Andi Muhammad Ishak, Apt., M.Si.

Pembina Utama Madya / IV d
NIP. 19680814 199403 1 012